



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1546, 2019

KEMEN-LHK. Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Tahun 2020. Renja.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019

TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan perlu disusun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
 12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I terkait.

Pasal 4

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 menjadi arahan dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 5

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 merupakan penyesuaian sasaran dan indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2020, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di Tahun 2020.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020

RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan menjadi penentu awal arah pembangunan agar diteruskan di tahun-tahun selanjutnya untuk keberhasilan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode tersebut. Sebagai tahun awal pelaksanaan RPJMN, penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 ini difokuskan pada penyesuaian rencana 5 (lima) tahun kedepan dan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN sebelumnya. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Secara Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 mempunyai tema utama "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" yang dilaksanakan dalam lima Prioritas Nasional;
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/ Lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;

4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Rencana Kerja Pemerintah memiliki poin utama untuk mencapai tujuan kerja pemerintah setahun kedepan dengan membuat prioritas nasional. Prioritas Nasional ditetapkan mulai pada tahun 2017 dan terdapat 23 Prioritas Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendukung 14 Prioritas Nasional dari 23 Prioritas nasional, 21 Proyek Prioritas Nasional dan 47 Kegiatan prioritas Nasional. Prioritas Nasional di Tahun 2018 dan Tahun 2019 dilakukan penajaman atau *refocusing*. Pada Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 9 dari 10 Prioritas Nasional, 13 Program Prioritas, dan 23 Kegiatan Prioritas sedangkan di Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 3 dari 5 Prioritas Nasional, 13 Program Prioritas dan 23 Kegiatan Prioritas. Tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat di dalam Prioritas Nasional yang sama dengan Tahun 2019 namun terdapat perbedaan detail di dalam nomenklatur. Tujuannya yaitu untuk mensinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengintegrasikan pembangunan dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2020, dimana posisi pembangunan LHK diintegrasikan dalam 3 dari 5 prioritas nasional : 1) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, 2) nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan 3) ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup. Pembangunan tematik Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2020 mendukung RKP 2020 meliputi Kesetaraan Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Transformasi Digital. Target Pembangunan Tahun 2020 yaitu pertumbuhan ekonomi 5.3-5.5%, tingkat kemiskinan 8-9%, tingkat pengangguran terbuka 4.7-5.1%, indeks pembangunan manusia 72.5, dan indeks gini 0.375-0.38.

II. SASARAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020

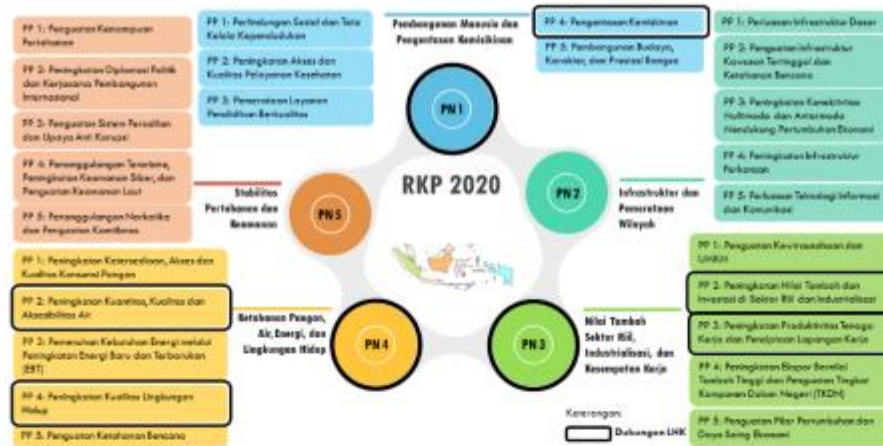
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini memperhatikan arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung Pembangunan Nasional Tahun 2020 berupa:

1. Peningkatan daya saing produk kehutanan dan memperkuat sirkular ekonomi pembangunan lingkungan hidup (termasuk memperkuat tata kelola dan pengembangan SDM).
2. Mempertahankan dan mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan (termasuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan), mengurangi beban lingkungan untuk menyiapkan landasan pembangunan rendah karbon, pengurangan emisi dan secara bertahap memperbaiki kondisi lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai peran dalam menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung dan daya tampung berbagai kegiatan, pengendalian pencemaran, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim. Menjaga luasan dan fungsi hutan juga menjadi peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered spesies*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki sasaran utama di Tahun 2020 untuk mempertahankan perannya berupa meningkatkan nilai produk domestik bruto sektor hulu 5-7% (lima sampai tujuh per seratus), indeks lingkungan hidup 67-68.5, dan laju deforestasi 300-400 (tiga ratus sampai empat ratus) ribu/tahun.

III. DUKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Pembangunan Nasional Tahun 2020 menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, dalam rangka meningkatkan efisiensi serta memaksimalkan ketersediaan anggaran nasional.



Gambar 1. Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Prioritas Nasional

Prioritas Nasional 1: PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN



Gambar 2. Kegiatan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 mendukung Prioritas Nasional I pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung Prioritas Nasional tersebut adalah pengembangan Iptek-inovasi bidang LHK, pelaksanaan reformasi agrarian, dan perhutanan sosial. Pada era revolusi industri 4.0 saat ini, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersinergi untuk meningkatkan Iptek-inovasi agar menghilangkan kesan hutan tempat produksi menjadi pengembangan potensi hutan dari segala sektor untuk menciptakan hutan lestari yang melalui pengembangan Iptek-inovasi hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu, jasa lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kemitraan dengan masyarakat melalui perhutanan sosial dengan memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat dalam bentuk Hutan Kemitraan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat/Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan.

Tabel 1. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Prioritas Nasional	PP	KP	Pro Prioritas Nasional	Output	Total
01- Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	04- Pengentasan Kemiskinan	004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	01-Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	002-Kawasan hutan sebagai obyek TORA	2.077.610,00
				006-Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATE obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	80.769.555,00
			04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan	011-Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	917.950,00
				001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan	3.900.000,00
				001-Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	1.744.370,00
				001-Luas kawasan hutan yang memperoleh Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS	8.500.000,00
				002-Kasus konflik tenurial yang ditangani	4.200.000,00
				003-Hutan Adat yang ditetapkan	7.250.000,00
003-Luas penyiapan Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS	26.662.680,00				

Prioritas Nasional	PP	KP	Pro Prioritas Nasional	Output	Total
				004-Izin perhutanan sosial yang dievaluasi	7.500.000,00
				007-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	57.479.479,00
			05- Pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembangan usahanya	001-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang terbentuk	10.000.000,00
			06- Pengembangan usaha perhutanan sosial berkelanjutan	002-Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	106.721.660,00
			07- Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial	001-Mitra Perhutanan Sosial yang diberdayakan	6.625.000,00
				001-Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat	3.200.000,00
				002-Kelompok Tani Hutan Mandiri	4.100.000,00
				002-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	37.170.330,00
				005-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dikembangkan	21.700.000,00
Total					390.272.174,00

**Prioritas Nasional 3:
NILAI TAMBAH SEKTOR RIIL, INDUSTRIALISASI, DAN KESEMPATAN KERJA**



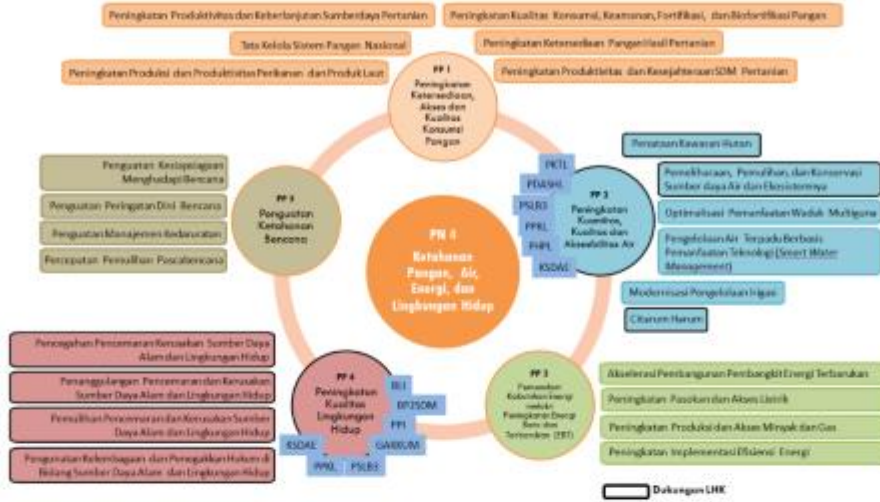
Gambar 3. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif

Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja adalah optimalisasi hasil hutan untuk meningkatkan PNBK, Pengembangan model iptek di 7 destinasi pariwisata prioritas dan 2 KEK pariwisata, pengembangan ekowisata dan wisata bahari pada kawasan konservasi, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan SDM yang siap kerja dibidang LHK. Kegiatan-kegiatan tersebut diperinci pada tabel berikut:

Tabel 2. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja

Prioritas Nasional	PP	KP	Pro Prioritas Nasional	Output	Total
03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	02-Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	01-Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir	06-Optimalisasi Hasil Hutan	001-Pembinaan kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang Membayar PNBPNP kehutanan	2.999.750,00
				001-Rekomendasi Penilaian IUPHHK yang telah diterbitkan	14.076.000,00
				002-Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	1.001.150,00
				002-Rekomendasi Tertib luran dan Penataanusahaa n Hasil Hutan	3.000.000,00
	002-Verifikasi terhadap Sertifikat legalitas kayu yang diterbitkan	10.000.000,00			
	003-Volume Ekspor Produk Industri Kehutanan	2.248.600,00			
	03-Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja	04-Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	01-Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan DPP Baru	001-Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	179.691.956,00
07-Pengembangan klaster destinasi wisata alam berbasis hutan dan ekosistem di dalamnya			004-Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN	123.947.000,00	
		02-Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	03-Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	001-Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	74.256.350,00
Total					412.970.806,00

**Prioritas Nasional 4:
KETAHANAN PANGAN, AIR, ENERGI, DAN LINGKUNGAN HIDUP**



Gambar 4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Program Prioritas Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air

Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup adalah dengan penetapan dan perlindungan kawasan lindung, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), rehabilitasi hutan dan DAS, dan revitalisasi danau. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan kebakaran hutan, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, pengelolaan sampah dan limbah, serta pemantauan kualitas air, air laut, dan udara. Strategi tersebut diterjemahkan kedalam kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:

Tabel 3. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	PP	KP	Pro Prioritas Nasional	Output	Total
04- Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	01- Penataan Kawasan Hutan	01- Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional)	002- Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi	6.869.300,00
				003- Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi	12.930.245,00

Prioritas Nasional	PP	KP	Pro Prioritas Nasional	Output	Total
				006-Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi pada 5 Provinsi	750.000,00
				010-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	1.500.000,00
				011-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	847.807,00
			04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa	001-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	4.271.600,00
				002-Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	74.261.863,00
				002-Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	8.619.796,00
				002-Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	8.077.500,00
				003-Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	119.361.961,00
			05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	002-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	450.000,00

Prioritas Nasional	PP	KP	Pro Prioritas Nasional	Output	Total
				004-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	13.652.323,00
				007-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	20.100.000,00
				012-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH	13.497.297,00
		02- Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya	01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis	002-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Vegetatif	1.939.605.401,00
				003-Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkatkan kapasitasnya	7.167.572,00
				003-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis	61.701.277,00
			02-Pemulihan dan konservasi daerah tangkapan air	001-Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya	120.888.741,00
			07-Revitalisasi Danau	005-Dokumen Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	4.000.000,00
		06-Citarum Harum	02-Penanganan Limbah Cair dan Sanitasi- Kualitas Air: Klasifikasi Minimal Kelas IV	011-Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Air di DAS Citarum	12.090.790,00
			03-Modernisasi Pengelolaan Sampah	005-Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah DAS Citarum	12.038.000,00
	04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara	003- Pembangunan Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi Lingkungan	73.990.000,00
				005-Data dan Informasi Kualitas Udara	31.050.000,00

Prioritas Nasional	PP	KP	Pro Prioritas Nasional	Output	Total
				006-Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya	15.229.600,00
				010-Data dan Informasi Kualitas Air	96.439.210,00
			03-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	004-Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	150.502,813,00
				006-Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	32.390.000,00
			04-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	001-SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari	5.977.760,00
			05-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	001-Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	87.591.893,00
		02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penanganan Pencemaran di Pesisir dan Laut	004-Pengelolaan Sampah Terpadu di Wilayah Pesisir dan Laut	22.600.000,00
				007-Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	4.170.400,00
			02-Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik	001-Pengurangan Timbunan Sampah Nasional	16.050.000,00
			03-Penghapusan dan Penggantian Merkuri di lokasi PESK	001-Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di daerah PESK	12.000.000,00
			04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis	004-Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	76.140.000,00
				012-Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air	50.000.000,00
		03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya	01- Pemulihan Gambut	001-Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi	19.550.000,00

Prioritas Nasional	PP	KP	Pro Prioritas Nasional	Output	Total
		Alam dan Lingkungan Hidup		003-Luas gambut yang difasilitasi pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	300.000.000,00
			02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	001-Luas lahan bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan 003-Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi.	57.138.675,00 23.350.000,00
			03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	001-Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan fungsinya 006-Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai	5.900.000,00 25.151.840,00
		04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Lingkungan Hidup di Daerah	001-Data Dan Informasi Tingkat Kerentanan Dan Risiko Perubahan Iklim	2.100.000,00
			02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	001-Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	67.465.000,00
				001-Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	52.830.000,00
			03-Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	001-Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 001-Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	56.986.250,00 22.461.000,00
Total					3.749.980.339,00

IV. ALOKASI ANGGARAN DAN EVALUASI KEBERHASILAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dengan sumber dana dan sumber daya yang ada, pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target 2020 seperti yang telah ditetapkan.

Sinergitas dalam prioritas nasional, diharapkan dapat mendorong pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020 dan memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Surat Penyampaian Pagu Alokasi Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 Nomor S-704/MK.02/2019 dari Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Anggaran Tahun 2020 Per Program berdasarkan Pagu Alokasi

Program	Alokasi (Ribu Rupiah)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	592.759.666,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	86.966.609,00
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	301.754.834,00
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	2.799.916.214,00
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	2.049.226.996,00
Program Planologi dan Tata Lingkungan	480.427.464,00
Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	393.833.245,00
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	341.386.089,00
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	458.679.200,00
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	468.790.771,00
Program Pengendalian Perubahan Iklim	313.272.831,00
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	361.844.139,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	670.467.758,00
Total	9.319.325.816,00

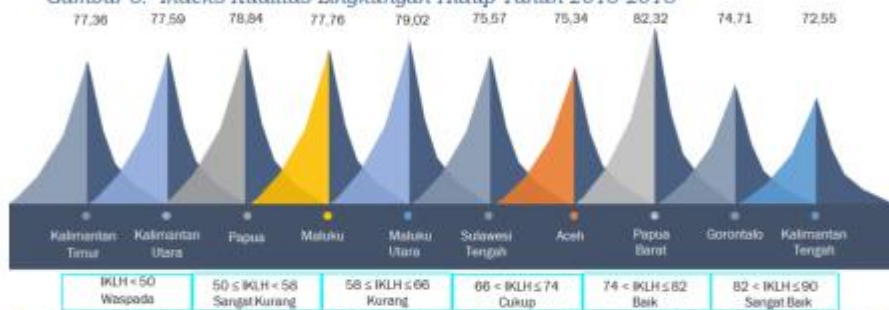
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan Hidup Indonesia Target Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2018 adalah 65-66,5. Capaian IKLH Tahun 2018 sebesar 65,14, namun menurun sebesar 1,98 % dibandingkan periode yang sama (Y o Y) di tahun sebelumnya. Kecenderungan ini dibangun dari anasir indeks kualitas air (Y o Y = -13,07 %), indeks kualitas udara (Y o Y = -2,79 %) dan indeks tutupan hutan dan lahan (Y o Y = 7,29 %). Persentase Capaian IKLH Tahun 2018 sebesar 100,22%. Nilai IKLH ini juga memenuhi 97,95% dari rentang rencana capaian dalam Renstra Tahun 2015-2019. Terdapat 10 provinsi dengan nilai IKLH tertinggi Tahun 2018 di Indonesia dengan katagori baik dan sangat baik. Provinsi Papua Barat

memiliki nilai paling tinggi yaitu 82.32, diharapkan provinsi lain dapat meningkatkan nilai IKLH agar kualitas lingkungan Indonesia meningkat.



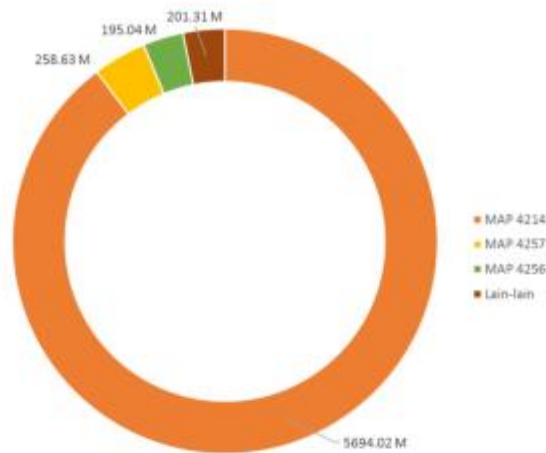
Gambar 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015-2018



Gambar 6. 10 Provinsi dengan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tertinggi Tahun 2019

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah PNBPN Tahun 2018 sebesar Rp. 6,349 Triliun. Pendapatan Kehutanan terbesar berasal dari (MAP 4214) yang berasal dari Dana Reboisasi, Penggunaan Kawasan Hutan, Provisi Sumberdaya Hutan, Pendapatan IIUPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman, Pemanfaatan Air dan Energi sebesar Rp. 5.694,02 Miliar. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (MAP 4257) sebesar Rp. 258,63 Miliar. Pendapatan Jasa yang berasal dari wisata, iuran, dan jasa bidang lingkungan hidup dan kehutanan (MAP 4256) sebesar Rp. 195,05 Miliar. Angka ini meningkat 22.05 % dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya. Capaian Kinerja Tahun 2018 sebesar 208.16 %, Proporsi Capaian kumulatif Tahun 2015-2018 terhadap rencana capaian 2015-2019 sebesar 119.5 %.



Gambar 7. Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2018

EKSPOR HASIL HUTAN

Indeks Kinerja Utama 3 Nilai Ekspor disumbangkan dari kayu olahan dan TSL. Nilai kayu olahan Tahun 2018 sebesar US\$ 12.18 M sedangkan pada tahun 2017 sebesar US\$ 10,98 Miliar. Tahun 2016 Nilai Ekspor kayu sebesar 9,27 US\$ dan tahun 2015 sebesar 9,84 US\$. Sedangkan Ekspor TSL tahun 2015 sebesar 5,3 Trilyun Rupiah, Tahun 2016 sebesar 6,54 Trilyun Rupiah, tahun 2017 sebesar 8,26 Trilyun Rupiah, dan tahun 2018 sebesar 13.16 Trilyun Rupiah.

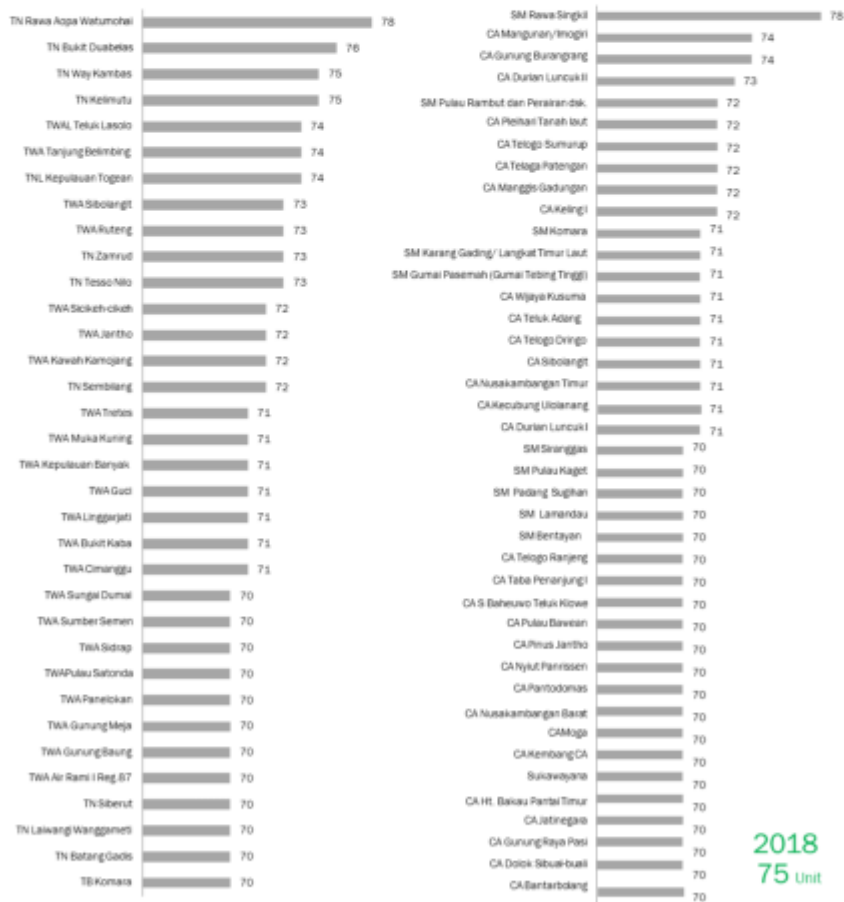


Gambar 8. Nilai Ekspor Kayu Olahan dan TSL Tahun 2015- 2018

KAWASAN KONSERVASI DENGAN NILAI MINIMAL 70

Perbaikan pengelolaan unit kawasan konservasi ditunjukkan dengan adanya nilai *Management Effectiveness Tracking Tools* (METT). Nilai METT yang menunjukkan pengelolaan membaik pada setiap Kawasan konservasi harus memiliki nilai minimal 70. Nilai METT bertujuan menunjukkan bahwa kawasan konservasi yang dikelola telah diintervensi secara nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang melingkupinya

sehingga masyarakat pun mendapatkan manfaat secara nyata, baik langsung maupun tidak langsung. Kawasan Konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan, sangat menentukan tidak hanya keberlangsungan proses ekologis di dalam kawasannya tapi juga bagi daerah penyangga di sekitarnya. Pengelolaan yang baik terhadap kawasan konservasi akan membawa hasil dan dampak yang positif bagi ekosistem di dalam kawasan, daerah penyangga di sekitarnya dan bahkan terasa dampaknya di tingkat regional dan nasional. Entitas pengukuran adalah Kawasan Suaka Alam, yang terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (SM), serta Kawasan Pelestarian Alam, yang terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Di luar KSA/KPA terdapat juga Taman Buru.

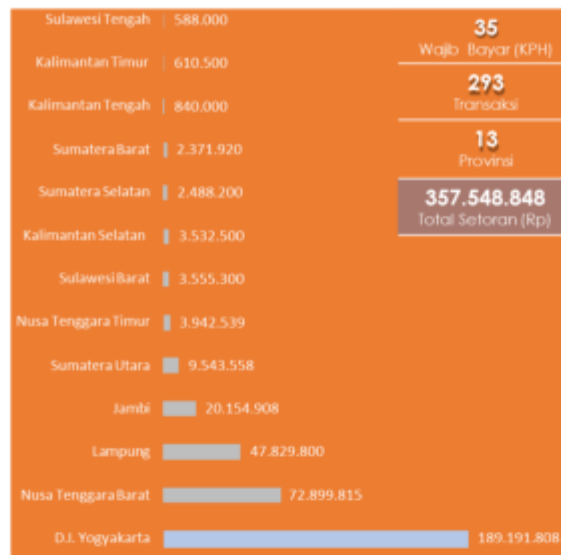


Gambar 9. Nilai METT Kawasan Konservasi Tahun 2018

Pada Tahun 2018 kinerja nilai *METT* sebesar 77,50%, presentase capaian Tahun 2015-2018 ke Tahun 2015-2019 sebesar 57,69%, dan *Year of Year* 87,50%. Hasil kinerja tersebut diperoleh atas prestasi dari 75 (tujuh puluh lima) kawasan konservasi dengan nilai *METT* minimal 70 (tujuh puluh), yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Cagar Alam, 20 (dua puluh) Taman Wisata Alam, 10 (sepuluh) Suaka Margasatwa, 1 (satu) Taman Buru, dan 11 (sebelas) Taman Nasional. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, terjadi peningkatan sebesar 35 (tiga puluh lima) kawasan konservasi. Secara kumulatif kinerja unit kawasan konservasi yang pengelolaannya sudah efektif menunjukkan tren positif. Pada Tahun 2015 kinerjanya hanya 22,00% (tercapai 11 (sebelas) unit kawasan konservasi dari target 50 (lima puluh) unit kawasan konservasi), Tahun 2016 meningkat menjadi 40,00% (tercapai 40 unit kawasan konservasi dari target 100 (seratus) unit kawasan konservasi), di Tahun 2017 sebesar 53,33% (tercapai 80 (delapan puluh) unit kawasan konservasi dari target 150 (seratus lima puluh) unit kawasan konservasi), dan Tahun 2018 kinerja meningkat kembali menjadi 77,50% (tercapai 155 (seratus lima puluh lima) unit kawasan konservasi dari target 200 (dua ratus) unit konservasi). Capaian 2019 diharapkan tercapai 100% dengan meningkatkan efektifitas 260 (dua ratus enam puluh) unit kawasan konservasi.

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Hingga tahun 2018 kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebesar 63,19%. Persentase tersebut berasal dari ketercapaian jumlah KPH yang telah memproduksi barang dan jasa sebanyak 170 KPH, terdiri atas 89 (delapan puluh sembilan) KPHP dan 81 (delapan puluh satu) KPHL dari rencana 269 (dua ratus enam puluh sembilan) unit KPH. Pada tahun 2018 tercatat kontribusi KPH dalam PNBPN sebesar 357,54 juta, yang diperoleh dari 35 unit KPH wajib bayar dengan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) transaksi yang tersebar di 13 (tiga belas) provinsi. Hal ini merupakan prestasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan sektor ekonomi masyarakat di sekitar KPH.



Gambar 10. Kontribusi KPH terhadap PNPB Tahun 2018

KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA MASYARAKAT SEBAGAI SENTRA PRODUKSI HASIL HUTAN

Tahun 2019 menjadi penentu keberhasilan dalam kegiatan rencana strategis perhutanan sosial untuk 12,7 juta Ha kawasan hutan dapat diakses oleh masyarakat. Hasil kumulatif capaian tersebut sampai tahun 2018 sebesar 2.506.741 Ha dengan persentase 19,74%, hasil ini sangat kecil dalam capaian kumulatif target renstra. Perhutanan sosial membuat terobosan untuk mencapai target tersebut dengan beberapa skema: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), Hutan Adat (HA), dan yang terakhir adalah skema Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN-KK), yang merupakan pengakuan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Perhutanan sosial menargetkan 2.000.000 Ha di tahun 2018 untuk mendukung capaian target renstra. Hasil yang diperoleh hanya 1.264.156 Ha untuk akses kelola hutan sosial dengan persentase 63,08%. Hasil capaian ini belum memenuhi target yang diharapkan dalam akses kelola hutan sosial, namun Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan memberikan keseriusan dengan meningkatkan capaian per tahun. Kinerja Perhutanan Sosial terus mempercepat langkah, tahun

2018 capaian kinerja (Y o Y) sebesar 136,51% dari capaian luas Perhutanan Sosial tahun 2017 sebesar 520.037 Ha.



Gambar 11. Luas Ijin Pemanfaatan Perhutanan Sosial (Ha), Sumber Data: Laporan Kinerja 2018 Biro Perencanaan

PROVINSI YANG DAPAT DILINDUNGI DARI BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Ada 7 (tujuh) provinsi prioritas yang telah dilindungi dari bahaya kebakaran hutan di tahun 2018, dan kini kinerjanya dapat dirasakan dengan luas kebakaran hutan dan lahan yang cenderung berkurang serta jumlah hari asap melintas negara turun. Di tahun 2015 tercatat 21 (dua puluh satu) hari asap melintas negara, pada tahun 2016 menurun menjadi hanya 4 (empat) hari serta di tahun 2017 dan tahun 2018 tidak terjadi asap yang melintas negara. Kinerja 2018 sebesar 80,42% dan *Year of Year* turun sebesar 13,01%.



Gambar 12. Luas Kebakaran Hutan (Ha) Tahun 2015 sd 2018 , Sumber Data: Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, Biro Perencanaan

PRIORITAS NASIONAL

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, pada tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan sebesar Rp. 4.181 Trilyun dari total alokasi Rp. 9.319 Trilyun pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Alokasi Anggaran Tahun 2020 Per Prioritas Nasional berdasarkan Pagu Alokasi

No.	Prioritas Nasional	Alokasi 2020 (ribu)
1.	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	390.272.174,00
2.	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	412.970.806,00
3.	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	3.749.980.339,00
Total		4.181.550.319,00

Sumber dana yang sudah dialokasikan tersebut dimaksimalkan untuk mencapai target kegiatan 2020 yang telah ditetapkan, untuk mendukung 3 (tiga) Prioritas Nasional melalui Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja, serta Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, dengan tidak melupakan tugas dan fungsi utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam menjamin ekosistem agar dalam keberadaan yang seimbang.

Sedangkan pada tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 9 (sembilan) Prioritas Nasional dari 10 (sepuluh) Prioritas Nasional di tingkat nasional. Data capaian Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Pendidikan telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta kecakapan kerja melalui penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan, dan juga peningkatan kualitas sarana pembelajaran masyarakat melalui pengembangan KHDTK. Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat 4 (empat) unit pengembangan KHDTK dan 455 (empat ratus lima puluh lima) orang tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan.

2. Kesehatan

Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Prioritas Nasional Kesehatan yaitu melalui gerakan masyarakat hidup sehat yang dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE dan Ditjen PSLB3. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Prioritas Nasional ini yaitu: penghapusan penggunaan merkuri di 7 (tujuh) lokasi, pengamanan terhadap kawasan Taman Nasional Lore Lindu seluas 66.105,29 Ha, dan restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di Taman Nasional Lore Lindu seluas 5 (lima) Ha.

3. Perumahan dan Energi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pencapaian dalam bidang perumahan dan energi dengan berkontribusi pada peningkatan ketersediaan air baku melalui penyediaan sumur resapan. Inisiasi ini dilakukan oleh Ditjen PDASHL yang dilaksanakan pada DAS prioritas. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada inisiasi ini yaitu 6000 (enam ribu) unit sumur resapan air di 15 (lima belas) DAS prioritas.

4. Ketahanan Energi

Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional ketahanan energi yaitu dengan menyediakan energi berbasis air (mini/mikrohidro) di kawasan konservasi. Pembangunan energi berbasis air ini dilakukan oleh ditjen KSDAE pada kawasan taman nasional dan non kawasan taman nasional. Pada Tahun 2018 capaian yang telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu menghasilkan energi mini/mikrohidro di kawasan taman nasional sebesar 10.090 (sepuluh ribu sembilan puluh) Kwatt dan di kawasan non taman nasional sebesar 210 (dua ratus sepuluh) Kwatt.

5. Penanggulangan Kemiskinan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu kementerian yang terjun langsung ke tingkat tapak, turut berkontribusi dalam prioritas nasional untuk penanggulangan kemiskinan. Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan yaitu memfasilitasi kelembagaan usaha koperasi, penguatan modal usaha

dan fasilitasi sertifikasi, standardisasi merek dan kemasan untuk membantu memasarkan produk hasil hutan yang dikelola masyarakat. Pelaku utama dalam penanggulangan kemiskinan ini yaitu Ditjen PSKL sebagai pembuat kelompok, BP2SDM sebagai pemberi pelatihan dan peningkatan ilmu untuk pengembangan usaha, serta Ditjen PHPL sebagai pemberi sertifikasi untuk melegalkan penjualan hasil hutan yang dikelola masyarakat. Tahun 2018, capaian yang diperoleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan yaitu peningkatan jumlah kelas kelompok tani hutan dari tingkatan pemula ke madya sebanyak 367 unit, pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat, dan Kemitraan) yang mandiri sebanyak 2.647 kelompok, dan 152 kelompok UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK.

6. Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan aktif dalam bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan. Kegiatan tersebut yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat sebanyak 20 (dua puluh) laporan melalui Inspektorat Jenderal. Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penguatan kapasitas dan pemenuhan standardisasi LPSE sebanyak 12 (dua belas) standardisasi serta penguatan *system Monev Next Generation Online* oleh Sekretariat Jenderal. Hasil dari peran aktif tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat nilai PPID sebesar 74,4 berdasarkan nilai keterbukaan informasi publik.

7. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional ini yaitu dengan penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya Tarik wisata di kawasan Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika yang didukung oleh Ditjen KSDAE dan BLI dengan menciptakan destinasi bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dalam rangka percepatan pertumbuhan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus. Capaian yang telah ditorehkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengembangan dunia usaha dan pariwisata sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi sebanyak 22 (dua puluh dua) unit;
 - b. Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di kawasan Danau Toba dan sekitarnya sebanyak 7 (tujuh) unit;
 - c. Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di kawasan Borobudur dan sekitarnya sebanyak 4 (empat) unit;
 - d. Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di kawasan Mandalika dan sekitarnya sebanyak 7 (tujuh) unit;
 - e. Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit;
 - f. Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di kawasan Danau Toba dan sekitarnya sebanyak 2 (dua) unit;
 - g. Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di kawasan Borobudur dan sekitarnya sebanyak 2 (dua) unit;
 - h. Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di kawasan Mandalika dan sekitarnya sebanyak 3 (tiga) unit;
 - i. Pengkajian dan pengembangan ekowisata kawasan hutan Aek Nauli.
8. Ketahanan Pangan
- Kegiatan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional ketahanan pangan yaitu dengan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung ketahanan air untuk mencegah kekeringan dan mitigasi bencana banjir. Pelaksana utama dalam kegiatan ini adalah Ditjen PDASHL. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung prioritas nasional ketahanan pangan sebagai berikut:
- a. Tersedianya bibit berkualitas sebanyak 49.549.368 batang;
 - b. Tersedianya bibit produktif sebanyak 2.623.573 batang;
 - c. Hutan dan lahan kritis di DAS yang mendukung ketahanan pangan direhabilitasi seluas 8.525 Ha;
 - d. Pembuatan Bangunan KTA yang mendukung ketahanan pangan (Dpi, DPn, dan *Gully Plug*) sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) unit.
9. Pembangunan Kewilayahan
- Dalam upaya Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkontribusi melalui kegiatan penataan dan

perencanaan kawasan hutan yang dilakukan oleh Ditjen PKTL. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan yang didukung oleh Ditjen KSDAE, PSKL, PHPL, PDASHL, dan BP2SDM. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan rehabilitasi kawasan pedesaan yang rusak dan tercemar yang dilakukan oleh Ditjen PPKL. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung prioritas nasional ini yaitu meningkatnya keanekaragaman hayati dengan peningkatan populasi spesies terancam punah sebanyak 32,04%, penanganan konflik tenurial seluas 504.486 Ha, kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan seluas 88,20 juta Ha, penanggulangan kebakaran di 26 (dua puluh enam) unit kawasan konservasi non taman nasional dan 48 (empat puluh delapan) unit di taman nasional, serta melaksanakan pemulihan gambut seluas 307.953 Ha.

V. PENGARUSUTAMAAN

Kebijakan pengarusutamaan menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan pengarusutamaan di dalam Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 mencakup 6 (enam) Pengarusutamaan yaitu Pembangunan Berkelanjutan; Tata Kelola Pemerintah yang baik; Kesetaraan Gender; Modal Sosial Nudaya; Transformasi Digital; Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim.

a. Pembangunan Berkelanjutan

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya, dan mengejawantahkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di setiap sektor/bidang dan wilayah/daerah.

b. Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Arah kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik akan ditempuh dengan cara yaitu meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi

pemerintah, meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Pengarusutamaan Gender

Sasaran Pengarusutamaan Gender diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian LHK, melalui:

- a. Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
- b. Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG;
- c. Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- d. Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
- e. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; dan
- f. Penyediaan sarana prasarana yang responsif gender.

d. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Kebijakan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan ada 4 (empat) program prioritas, yaitu: Meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya, Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.

e. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Sasaran Pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui kebijakan, yaitu membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Mengoptimalkan pengelolaan *Big Data*.

f. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Arah kebijakan dan strategi untuk mengurangi kerentanan bencana, yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebencanaan, mengembangkan dan menguatkan sistem peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat, mengembangkan sistem logistik kebencanaan nasional dilengkapi sistem tata kelola dan distribusi yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil, sebagai upaya penanganan bencana.

Peningkatan ketahanan iklim dilaksanakan melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim pada sektor-sektor prioritas yaitu:

1. ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir;
2. ketahanan iklim sektor air;
3. ketahanan iklim sektor pertanian; dan
4. ketahanan iklim sektor kesehatan.

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2020 dibuat untuk menjadi acuan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 merupakan sarana transisi untuk menyambung RPJMN Tahun 2015-2019 dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Tahun 2020 perlu dilaksanakan dan dikawal bersama demi menggerakkan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. Rencana Kerja Tahun 2020 telah memasukkan Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 yang disusun berdasarkan evaluasi, arahan, dan masukan untuk pembangunan satu tahun mendatang, dan titik awal pelaksanaan RPJMN dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Tahun 2020 ini diharapkan mampu memberikan arahan dan acuan agar dapat ditindaklanjuti berupa Rencana Kerja Eselon I atau Eselon II atau Satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dapat mengidentifikasi rencana aksi yang sekiranya dapat mendukung capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tercantum pada RKP ini diharapkan dapat membawa perubahan secara nyata di tingkat tapak dan sarana mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal terhadap kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup akan lahan, sumber daya air, kebutuhan udara bersih serta menjaga sumber daya hutan dan lingkungan dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019
 TENTANG
 RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN TAHUN 2020

Matriks Rencana dan Kegiatan
 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator (Output)	Target/ Satuan	Prioritas Nasional	Proyek Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Prioritas Bidang	Lokasi	Alokasi (Ribu Rupiah)
029.01.01-Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	01-Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup KLHK									592.759.666,00
5367- Penylaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK	01- Terinformasiaknya kebijakan, program, kegiatan, dan hasil pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan									10.094.400,00
		9.58-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informatasi	1-Layanan					00-Bukan prioritas bidang	Pusat	10.094.400,00

53.68- Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK	01-Tersedianya Data dan Informasi yang Valid dan Mudah Diakses	001-Sistem Informasi KLHK dan Command Center	2-Sistem							00-Bukan prioritas bidang	Pusat	23.287.668,00	30.141.268,00
	02-Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	963-Layanan Data dan Informasi	1-Layanan							00-Bukan prioritas bidang	Pusat	6.853.600,00	
53.69-Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	01-Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup dan ketahanan											67.479.233,00	
		003-Forest and Climate Change Programme Financial Cooperation	95-% dana tersalurkan							00-Bukan prioritas bidang	Pusat	39.219.233,00	
53.70-Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perangkat Kementrian LHK	01-Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup dan ketahanan	952-Layanan Perencanaan	1-Layanan							00-Bukan prioritas bidang	Pusat	28.260.000,00	268.646.040,00
		951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1-Layanan							10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi DKI Jakarta	1.480.000,00	
		956-Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	1-Layanan							10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	Provinsi DKI Jakarta	5.234.924,00	

5371-Pembinaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01-Nilai komitmen pembiayaan insialisasi dana bergulir minimal sebesar 2 T peraku usaha pelakuan dalam kehuatanan dalam rangka RHL mitra KPH dan non KPH (HTL, HTR, HKn, HD, HR dan HHBK).		962-Layanan Umum	1-Layanan								hidup	Provinsi DKI Jakarta	39.207.709,00
			984-Layanan Perkantoran	1-Layanan									Provinsi DKI Jakarta	222.723.407,00
														68.359.900,00
			001-Dana bergulir yang terdistribusi	500-Milyar Rupiah								00-Bukan prioritas bidang	Pusat	63.253.000,00
			002-Penerimaan Negara Bukan Pajak/Pendapatan BLU Pusat P2H	124-Milyar Rupiah								00-Bukan prioritas bidang	Pusat	5.097.000,00
5372-Pembinaan dan Koordinasi kerjasama luar negeri	01-Terperuhnya Dukungan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Bagi Seluruh Program KLHK													14.504.909,00
			964-Layanan Kerjasama Internasional	1-Layanan									Pusat	13.504.909,00

										Asia Tengah Dan Timur	1.000.000,00
5373-Pengendalian Ekoregion Jawa	01-Meningkatnya sinergitas dan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Jawa	001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion	5-Dokumen							Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten	15.615.572,00
		950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1-Layanan							10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	3.525.875,00
		951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1-Layanan							10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	984.000,00
		994-Layanan Perkantoran	1-Layanan							10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	240.125,00
5374-Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra	01-Meningkatnya sinergitas dan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra									Provinsi DI Yogyakarta	10.865.572,00
											15.192.300,00

																						2.704.947,00	
	001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion	5-Dokumen									10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur										1.573.687,00	
	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1-Layanan									10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur										471.366,00	
	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1-Layanan									10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Bali										10.442.308,00	
	994-Layanan Perkantoran	1-Layanan									10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Bali										14.622.952,00	
575-Pengendalian Ekoregion Kalimantan	01-Meningkatnya sinergitas dan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Kalimantan																						
	001-Layanan Pengendalian Ekoregion	5-Dokumen									10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi										3.000.000,00	

																			Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara	1.750.000,00	
						950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1-Layanan												64-Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000,00	
						951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1-Layanan												64-Provinsi Kalimantan Timur	8.872.952,00	
						994-Layanan Perkantoran	1-Layanan												64-Provinsi Kalimantan Timur	17.332.730,00	
5376-Pengendalian Ekoregion Sulawesi dan Maluku		01-Meningkatnya sinergitas dan pendirian pembangunan LHK di Ekoregion Sulawesi dan Maluku																			
						001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion	2-Dokumen												Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi	3.221.785,00	

										10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	4.550.000,00
										10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	1.800.000,00
										10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Papua	400.000,00
										10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Papua	7.185.688,00
5579 Pengendalian Ekoregion Sumatera										01-Terkendalinya Pembangunan LH dan Kehutanan di Setiap Ekoregion		17.464.340,00
										10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Riau	3.975.870,00
										5-Dokumen		
										001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion		
										950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		
										2-Dokumen		
										951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
										1-Layanan		
										994-Layanan Perkantoran		
										1-Layanan		
										7-Dokumen		
										001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion		

									Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi DI Yogyakarta	1.051.890,00
950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1-Layanan								Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi DKI Jakarta	472.240,00
951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1-Layanan								Provinsi Riau	
994-Layanan Perkantoran	1-Layanan								Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung,	11.964.340,00

5380- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK	01-Tertibnya Pengelolaan Keuangan KLHK																	Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua	5.000.000,00
																		Pusat	2.605.000,00
																		Pusat	2.395.000,00
																			9.983.800,00
5381- Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian Kementerian LHK	01-Terselenggaranya Reformasi Birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan																	Provinsi DKI Jakarta	1.951.024,00
																		Provinsi DKI Jakarta	245.412,00

02-Terwujudnya Sistem Merit di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	954-Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	1-Layanan							00-Bukan prioritas bidang	Pusat dan Provinsi DKI Jakarta	7.787.364,00
5382-Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01-Jumlah Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus)										4.347.500,00
5383-Pengembangan telaahan kebijakan, perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	001-Standardisasi LHK	52-Dokumen							00-Bukan prioritas bidang	Pusat	4.347.500,00
											4.596.400,00
01-Tersedianya Regulasi dan Kebijakan LHK Lainnya serta Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum	957-Layanan Hukum	1-Layanan							10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	3.796.400,00
02-Tertanganinya Perkara dan Bantuan Hukum Bidang LHK											

5859- Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01-Tersedianya Rancangan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	001-Jumlah Perkara dan Bantuan Hukum bidang LHK yang tertangani	40-Perkara					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	800.000,00
										11.786.326,00
		001-Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis	12-Dokumen Rancangan					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	3.700.000,00
		951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1-Layanan					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	1.340.400,00
		994-Layanan Perkantoran	1-Layanan					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	6.446.426,00
	02-Tersedianya Indeks Kualitas Kebijakan KLHK	002-Kualitas Kebijakan KLHK	70-POIN					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	300.000,00

5660-Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01-Terselenggaranya pengelolaan sarana, peralatan dan infrastruktur teknis kehutanan dan lingkungan efektif dan efisien	001-NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya di Satker/UPT/KPH	3-Dokumen																		3.665.700,00	
029.02.03-Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01-Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi																					86.966.600,00
5384-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rjen Kementerian UHK	01-Pengjamin Kualitas Pengawasan																					60.939.603,00
		951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1-Layanan																			3.829.484,00
		994-Layanan Perkantoran	1-Layanan																			35.591.066,00

5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I	01-Pengawasan yang akuntabel	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1-Layanan						10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	21.516.053,00
											4.873.270,00
											4.873.270,00
5386-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II	01-Pengawasan yang akuntabel	965-Layanan Audit Internal	1-Layanan						10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	4.939.056,00
											4.939.056,00
											4.939.056,00
											4.939.056,00
5387-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III	01-Pengawasan yang akuntabel	965-Layanan Audit Internal	1-Layanan						10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	5.649.268,00
											5.649.268,00
											5.649.268,00
											5.649.268,00

5388-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Ibtwil IV	01-Pengawasan yang akuntabel	965-Layanan Audit Internal	1-Layanan																	5.155.490,00	
5389-Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	01-Pengawasan yang akuntabel	002-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	100-Persen																		5.410.920,00
029.03.06-Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	01-Meningkatkan tata kelola Hutan Produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien	003-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBM/WBBK	15-Persen																		3.500.000,00
	02-Mengembangkan multi bisnis Hutan produksi yang kompetitif																				1.910.920,00
																					301.754.834,00

03-Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Hutan Produksi									77.780.014,00
5396-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari									
		950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1-Layanan						25.488.712,00
		951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1-Layanan						5.316.000,00
		994-Layanan Perkantoran	1-Layanan						46.975.302,00
5397-Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi									8.264.550,00
01-Areal Hutan Produksi terdiri dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi									
		001-SK Menteri penerbitan RPHUP	20-Unit						2.950.800,00

				001-Pembinaan kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang Membayar PNPB kehutanan	269-Wajib Bayar	03-Nilai Tambah Sektor Rili, Industri lialisasi, dan Kesempatan Kerja	02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Rili dan Industri lialisasi	01- Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir	06-Optimalisasi Hasil Hutan	00-Bukan prioritas bidang	Pusat	2.999.750,00
			002-Rekomendasi Tertiburan dan Penataanusahaan Hasil Hutan	269-Unit	03-Nilai Tambah Sektor Rili, Industri lialisasi, dan Kesempatan Kerja	02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Rili dan Industri lialisasi	01- Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir	06-Optimalisasi Hasil Hutan	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	3.000.000,00	
5400-Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	01-Meningkatnya produksi HHBK dan Investasi Usaha Jasa Lingkungan				25-Unit					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	3.950.000,00
			001-Rekomendasi Pengembangan Usaha Restorasi Ekosistem/Pemantaa tan Kawasan(HHBK/ Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	6-Provinsi	03-Nilai Tambah Sektor Rili, Industri lialisasi, dan Kesempatan Kerja	02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Rili dan Industri lialisasi	01- Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir	06-Optimalisasi Hasil Hutan	00-Bukan prioritas bidang	Pusat	1.750.000,00	
			002-Diversifikasi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu									15.647.114,00
5401-Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	01-Meningkatnya Investasi dan Ekspor Produk Industri Kehutanan											

	001-zin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang diterbitkan (SK)	30-zin							10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	3.147.114,00
	002-Verifikasi terhadap Sertifikat legalitas kayu yang diterbitkan	160-Kelompok	03-Nilai Tambah Sektor Rili, Industri lisasi, dan Kesempatan Kerja	02-Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Rili dan Industri lisasi	01-Peningkatan Industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir	06-Optimalisasi Hasil Hutan		10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	10.000.000,00	
	003-Volume Ekspor Produk Industri Kehutanan	15-Juta ton	03-Nilai Tambah Sektor Rili, Industri lisasi, dan Kesempatan Kerja	02-Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Rili dan Industri lisasi	01-Peningkatan Industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir	06-Optimalisasi Hasil Hutan		10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	2.246.600,00	
	004-Nilai ekspor produk industri kehutanan	9-USD Miliar						10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	251.400,00	
5402-Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	01-Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KP HP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan kehutanan										174.287.406,00
	002-KPHP Maju	10-Unit KPHP						01-Pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang	Pusat	41.637.036,00	
	003-Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	34-Provinsi						00-Bukan prioritas bidang	Pusat	18.141.307,00	
	004-Investasi Khusus (HLN)	12-Unit KPHP						00-Bukan prioritas	Pusat	11.037.544,00	

			1-Layanan						bidang	Pusat	8.765.504,00
			1-Layanan	950-Layanan Dukung-an Manajemen Eselon I dan Prasara-na Internal					00-Bukan prioritas bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	8.125.466,00
			1-Layanan	994-Layanan Perkantoran					10-Bidang pengeloa-an sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	86.580.549,00
029.04.07-Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	01-Meningkatnya tutupan hutan dan lahan di hulu DAS, KPHL, Hutan Lindung dan hutan mangrove										2.799.916.214,00
	02-Meningkatnya kesehatan DAS prioritas										
	03-Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak										
5403-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	01-Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung										354.986.352,00

<p>950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</p>	<p>1-Layanan</p>	<p>10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,</p>	<p>74.676.452,00</p>
--	------------------	--	--	----------------------

5404 Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	01-Pulihnya kesehatan DAS kritis	994-Layanan Perkantoran	1-Layanan				10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua	280.309.900,00	2.100.922.902,00
--	----------------------------------	-------------------------	-----------	--	--	--	---	---	----------------	------------------

	001-Dokumen Pembinaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Vegetatif dan Sipil Teknis	1-Dokumen	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02- Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Air	02- Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya	01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	6.738.300,00
	002-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Vegetatif	56000-Ha							Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.	1.939.605.401,00

Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Utara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Gorontalo
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Maluku Utara
Provinsi Maluku
Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua

	003-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis	3000-Unit	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	02- Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya	01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis	00-Bukan prioritas bidang	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo	61.701.277,00
	004-Pembinatan Forest Program II (Development of Integrated Biodiversity Conservation and Watershed Management) 005-Forest Programme III (BPDA-SHL, Palu-Pase)	1-Kegiatan					00-Bukan prioritas bidang	Pusat dan Provinsi Jambi	50.957.750,00
		1-Kegiatan					00-Bukan prioritas bidang	Pusat	16.768.334,00

006-Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai	1000-Ha	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	00-Bukan prioritas bidang	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi	25.151.940,00
--	---------	---	--	---	--	---------------------------	---	---------------

54.05. Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	01-Meningkatnya pengelolaannya hutan lindung di tingkat tapak secara lestari	001-Dokumen pembinaan KPHL dan produksi HHBK	7-Kegiatan					Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, Provinsi Papua	41.337.771,00
						10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat		4.667.000,00

002-KPHL yang meningkat statusnya menjadi KPHL maju	10-KPH	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi	28.384.191,00
---	--------	---	--	---------------

<p>Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua</p>	<p>4.000.200,00</p> <p>3.686.380,00</p>
<p>01- Penganusutan dan pembangunan lintas bidang</p> <p>00-Bukan prioritas bidang</p>	<p>Pusat Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Nusa</p>
	<p>2-BPDASHL</p> <p>3000-Ton</p>
<p>003-Pembinaan Forest Programme IV Sulawesi Barat</p> <p>004-Produksi HHBK</p>	

54.06-Pembinaan Penyenggaraan Pengelolaan DAS	01-Menurunya Kekritisian DAS Prioritas	001-Dokumen Informasi pemantauan tala air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana dan Peningkatan kapasitas lembaga/for um peduli DAS	1-Dokumen																	Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Barat	91.093.589,00	
																				Pusat	5.000.000,00	
																					01- Pengurusuta maan dan pembangung an lintas bidang	

002-Jumlah Informasi pemantauan tsa air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana	34-Dokumen	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat	78.326.017,00
---	------------	---	--	---------------

Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua

003-Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkatkan kapasitasnya	34-lembaga/ forum	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	02- Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya	01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis	00-Bukan prioritas bidang	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan	7.167.572,00
--	-------------------	---	---	--	--	---------------------------	---	--------------

5407 Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	01-Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan	001-Dokumen Pembinaan Penyediaan Benih berkualitas, Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif serta Sumber benih unggul yang dibangun	1-Dokumen					Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	186.437.646,00	4.350.000,00
---	--	---	-----------	--	--	--	--	--	----------------	--------------

14.923.147,00	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup						100-Hektar	002-Sumber benih unggul yang dibangun				
---------------	---	---	--	--	--	--	--	------------	---------------------------------------	--	--	--	--

003-Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	4250000-Batang	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan	153.245.413,00
---	----------------	---	---	----------------

Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua

	004-Benh berkualitas dari sumber benih bersertifikat	100.000.000.000.000		10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi	13.919.086,00
--	---	---------------------	--	--	--	---------------

Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua

5408-Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	01-Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas	008-Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat	34-Unit						00-Bukan prioritas bidang	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara	5.510.449,00	25.137.954,00
--	---	--	---------	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--------------	---------------

02-Meningkatnya kualitas ekosistem danau di 15 Danau Prioritas	005-Dokumen Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1-Dokumen	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	02- Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya	07-Revisitasi Danau	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	4.000.000,00
--	---	-----------	---	---	--	---------------------	---	-------	--------------

13.767.505,00	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan
00-Bukan prioritas bidang	
34-Dokumen	
007-Data dan Informasi Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	

<p>Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua</p>																											
<p>009- Lembaga/komunitas peduli danau</p>																											

029.05.08-Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	01-Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati											2.049.226.996,00	Provinsi Utara
	02-Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL												
	03-Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari												
	04-Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi												
	05-Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi												

950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1-Layanan	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan,	92.498.684,00
---	-----------	---	--	---------------

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1-Layanan	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan,	78.884.990,00
---	-----------	---	--	---------------

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	Pusat	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1.037.418.675,00
	994-Layanan Perkantoran		
	1-Layanan		

5420-Perencanaan dan Informasi Konservasi Alam	01-Terjaminnya efektivitas pemolaan dan pemetaan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam	002 Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi	4145541 -Hektar	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Air	01-Pemanfaatan Kawasan Hutan	01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional)	00-Bukan prioritas bidang	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa	6.811.800,00	47.307.962,00
--	--	--	-----------------	---	---	------------------------------	---	---------------------------	---	--------------	---------------

003-Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi	54-Dokumen	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02-Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas Air	01-Penilaian Kawasan Hutan	01-Peretapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional)	00-Bukan prioritas bidang	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi	12.930.245,00
---	------------	---	--	----------------------------	---	---------------------------	--	---------------

5421 Pengelolaan Kawasan Konservasi	01-Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	001-Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya	1800000-Hektar	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Air	02-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya	02-Pemulihan dan konservasi daerah tangkapan air	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan	340.697.306,00	120.888.741,00
-------------------------------------	---	---	----------------	---	---	---	--	---	---	----------------	----------------

<p>002-Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif</p>	<p>900-Desa</p>	<p>04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup</p>	<p>02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air</p>	<p>01- Penataan Kawasan Hutan</p>	<p>04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa</p>	<p>10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi</p>	<p>74.724.588,00</p>
--	-----------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--	----------------------

003-Jumlah Kawasan Konservasi yang dilindungi Efektivitas Pengelolannya	552-Junit KK	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	01- Penataan Kawasan Hutan	04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi	119.361.961,00
---	--------------	---	---	----------------------------	---	---	--	----------------

Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	Pusat	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	6.030.344,00
Pusat	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	10.100.000,00	
004-Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi	30-Dokumen		
010-Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem	1-Kegiatan		

5422-Konservasi Spesies dan Genetik	01-Terjaminnya efektifitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik	011-Forest Programme II Sumatera	2-Kegiatan	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Jambi	18.591.672,00
			22000000-Hektar					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa	99.919.203,00 87.591.893,00

001-Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	18-Destinas	03-Nilai Tambah Sektor Rili, Industri lisasi, dan Kesempatan Kerja	02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Rili dan Industri lisasi	04- Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	01- Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan DPP Baru	00-Bukan prioritas bidang	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi	179.691.956,00
--	-------------	--	---	--	--	---------------------------	---	----------------

<p>Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Papua Barat dan Provinsi Papua</p>	<p>8.619.796,00</p>
	<p>00-Bukan prioritas bidang</p>
	<p>04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa</p>
	<p>01- Pemetaan Kawasan Hutan</p>
	<p>02- Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan Aksesibilitas Air</p>
	<p>04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup</p>
	<p>20-unit</p>
	<p>002-Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam</p>

001-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	6468953-Hektar	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Air	01-Penilaian Kawasan Hutan	04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi	4.100.500,00
--	----------------	---	---	----------------------------	---	---	---	--------------

	002-Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	14-Unit KEE	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02- Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Air	01- Penataan Kawasan Hutan	04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan	8.077.500,00
--	--	-------------	---	--	----------------------------	---	---	---	--------------

		01-Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual						03-Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial			17-Dokumen												10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup		Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara	Pusat	7.394.651,00	480.427.464,00
029.06.09-Program Planologi dan Tata Lingkungan		02-Tersedianya Data dan Informasi SDH	03-Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan																									

		04-Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung			
	05-Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Dijen PKTL, sesuai kerangka reformasi birokrasi				
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretaris/Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	01-Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 83,00 (A) di tahun 2024		1-Layanan	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	
				1-Layanan	
				1-Layanan	
			10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	7.953.634,00
		253.178.801,00	Pusat	Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi	

	970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1-Layanan		Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua	20.276.657,00
		10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup		Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan	

<p>Timor, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua</p>	<p>208.516.167,00</p>
<p>10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>Timor, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi</p>
<p>994-Layanan Perkantoran</p>	<p>1-Layanan</p>

54.33-Perengkuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	01-Terselesaikannya penetapan kawasan hutan sebesar minimal 80% seluruh kawasan hutan			01-Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kemiskinan	04-Pengentasan Kemiskinan		004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan		10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua	145.736.857,00
	001-Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5-Juta Hektar		01-Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kemiskinan	04-Pengentasan Kemiskinan		004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan		10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat		1.744.370,00
	004-Informasi dan dokumentasi penuguhan dan penatagunaan kawasan hutan	1-Judul								10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat		270.000,00

57.479.479,00	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	04-Penyajian prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan	004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	04-Pengentasan Kemiskinan	01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	5225-Km	007-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga
---------------	---	---	---	---	---------------------------	---	---------	--

02-Terselenggaranya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	005-Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	48-Permohon						10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	561.470,00
	008-Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	3-Dokumen						10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, dan Provinsi Gorontalo	3.080.833,00
03-Terselenggaranya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	002-Kawasan hutan sebagai obyek TORA	130000-Hektar						10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	2.077.610,00
								01-Perencanaan dan pelaksanaan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)		
								004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial		
								04-Pengentasan Kemiskinan		
								01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan		

5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	01-Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	006-Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyektif TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	21-Dokumen	01-Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	04-Pengentasan Kemiskinan	004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	01-Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua	80.523.095,00	25.195.310,00
---	--	--	------------	---	---------------------------	---	--	---	--	---------------	---------------

	001-Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	11-Dokumen	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	01- Penataan Kawasan Hutan	05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	4.870.508,00
	004-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	182-Klasifikasi					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah,	13.652.323,00

005-Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	22-Dokumen	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan,	6.672.479,00
---	------------	---	--	--------------

5435-Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	01-Tersedianya Peta Penetapan dan Kelengkapan KPH	002-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	530-Peta	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02- Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Air	01- Penataan Kawasan Hutan	05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	46.063.689,00
		007-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1-Laporan	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02- Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Air	01- Penataan Kawasan Hutan	05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	20.100.000,00

02-Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi	004-Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	10-Dokumen			10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	2.779.270,00
03-Terlaksananya pemohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	001-Layanan Pemohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNEBP Penggunaan Kawasan Hutan	1-Dokumen			10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	1.670.000,00

<p>013-Hasil Verifikasi PMP Pengunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH</p>	<p>19-Laporan</p>	<p>10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo,</p>	<p>6.649.172,00</p>
---	-------------------	--	---	---------------------

54.36-Pencapaian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	02-Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW, RDR, RPJP, RPJM dan KRP Prioritas di tingkat Nasional dan Daerah									Timor, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Maluku	5.717.807,00
		002-Dokumen KLHS, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion yang menjamin kualitasnya	30-Dokumen KLHS							Pusat	600.000,00
	03-Terlaksananya Penerapan RPPPLH pada Dokumen Perencanaan di Pusat dan Daerah										
	06-Tersedianya Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi	004-RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	6-Dokumen							Pusat	2.770.000,00

			65-Juta Ha	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	01- Pemanfaatan Kawasan Hutan	01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional)	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	1.500.000,00
			7-Dokumen	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	01- Pemanfaatan Kawasan Hutan	01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional)	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua	847.807,00
5437 Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	01-Terseleenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan									4.535.000,00
		010-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	60-Dokumen	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	01- Pemanfaatan Kawasan Hutan	01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional)	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	3.785.000,00
		011-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH								
		001-Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan								

029.07.04-Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01-Penguatan IPTEK bidang Lingkungan Hidup 02-Peningkatan IPTEK Nilai Tambah Hasil Hutan 03-Terkelolanya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Litbang 04-Tersedianya Produk Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Inovatif dan Implementatif	006-Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi pada 5 Provinsi	5-Provinsi	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	01-Penilaian Kawasan Hutan	01-Peretapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional)	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	750.000,00
5390-Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	01-Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1-Layanan							98.873.291,00
									Provinsi Jawa Barat	11.330.611,00

03--Terselenggaranya layanan perkantoran	994-Layanan Perkantoran	1-Layanan								10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Jawa Barat	86.342.680,00
5391-Pemelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan	01-Tersedianya produk hasil Litbang pengelolaan hutan yang inovatif dan implementatif											28.885.000,00
	001-Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan	7-Produk								10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Jawa Barat	1.328.500,00
	04-Terkelolanya KHDTK dan Hutan Penelisisan											
	004-Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelisisan	4-Urut								10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Jawa Barat	335.000,00
	05-Terkelolanya Laboratorium Pengelolaan Hutan											
	005-Pengelolaan Laboratorium Pengelolaan Hutan	4-Laboratorium								10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Jawa Barat	122.000,00

06-Terbangunnya Laboratorium Sutura Alam Indonesia	006-Pembangunan Laboratorium Sutura Alam Indonesia	1-Laboratorium							10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Jawa Barat	27.099.500,00
5392-Pemelitian dan Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan	01-Tersedianya produk hasil penelitian dan pengembangan bidang peningkatan nilai tambah hasil hutan										1.357.001,00
	02-Terkelolanya Laboratorium Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan	3-Produk							10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Jawa Barat	1.107.001,00
5393-Pemelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	01-Tersedianya produk hasil penelitian dan pengembangan kualitas lingkungan dan laboratorium	2-Laboratorium							10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Jawa Barat	250.000,00
											96.733.120,00

		001-Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan	4-Produk						10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Banten	622.537,00
	04- Tersedianya laboratorium rujukan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan dan kajian baku mutu kualitas lingkungan	002-Pengembangan Laboratorium Lingkungan Rujukan Nasional	1-Laboratorium Lingkungan						10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Banten	324.990,00
	06-Terselenggaranya layanan perantara	994-Layanan Perantara	1-Layanan						10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Banten	20.909.407,00
	07-Terbangunnya Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan	003-Pembangunan Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi Lingkungan	1-Laboratorium Riset			04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01- Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Banten	73.990.000,00

	04-Teskelolanya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) BIU	003-KHDTK dan Hutan Penelitian	31-Unit				10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	1.812.517,00
	05-Terselenggaranya Layanan Perkantoran	994-Layanan Perkantoran	15-Layanan				10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan	152.617.644,00

	6.828.674,00
Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi
	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
	15-Layanan
	970-Layanan Dukungan Manajemen Satker
06-Terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker	

5440-Perencanaan dan Pengembangan SDM	01-Tersedianya SDM tenaga teknis dalam mendukung operasionalisasi KPH dan SDM LHK kompeten																			7.240.350,00	
		001-Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5-Jenis Jabatan																		1.470.175,00
		002-Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5-Jenis Jabatan																		1.720.175,00
		003-SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya	1000-Orang																		4.050.000,00
5441-Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	01-Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan																				36.542.324,00
		001-SDM aparatur dan non aparatur LHK yang meningkatkan kapasitasnya	3260-orang																		28.112.324,00
		002-SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa	45-orang																		4.500.000,00

		003-Nilai KHDTK yang dikelola	55-poin				10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan	3.330.000,00
5442 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	01-Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan								109.375.000,00
		001-Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	472-orang	03-Nilai Tambah Sektor Rili, Industri Ilmiah, dan Kesempatan Kerja	03-Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja	02-Peningkatan Kualitas Penyalenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	03-Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	00-Bukan prioritas bidang	74.256.350,00
	994-Layanan Perkantoran		1-Layanan				00-Bukan prioritas bidang	Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Papua Barat	35.118.650,00

5443 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	01-Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup	001-SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari	1530-orang	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kesadaran dan Peminatan Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	00-Bukan prioritas bidang	Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Papua Barat	5.377.760,00	11.919.260,00
		002-Lembaga/komunitas yang melaksanakan gerakan masyarakat bela lingkungan	18-unit					00-Bukan prioritas bidang	Pusat	3.630.000,00	
		003-Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adheriyata)	500-unit					00-Bukan prioritas bidang	Pusat	2.311.500,00	
5444 Peningkatan Penyuluhan	01-Meningkatkan Jumlah Pendamping (Penyuluh Kehutanan) yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat									10.519.500,00	

						003-Luas penyiapan izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS	500000-Hektar		01-Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kemiskinan	04-Pengentasan Kemiskinan	004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan	00-Bukan prioritas bidang	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku	26.662.690,00
						004-Izin perhutanan sosial yang dievaluasi	300-S/K		01-Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kemiskinan	04-Pengentasan Kemiskinan	004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan	00-Bukan prioritas bidang	Pusat	7.500.000,00
						006-Penyiapan kawasan PS melalui Hibah Luar Negeri	12-Dokumen						10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Jambi	8.804.250,00
5415-Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat						01-Meningkatnya kelompok usaha perhutanan sosial									235.270.111,00
						001-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang terbentuk	1000-KUPS		01-Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kemiskinan	04-Pengentasan Kemiskinan	004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	05-Pengelolaan kolaborasi sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembangan usahanya	00-Bukan prioritas bidang	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku	10.000.000,00
						002-Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	1470-Paket		01-Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kemiskinan	04-Pengentasan Kemiskinan	004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	06-Pengembangan usaha perhutanan sosial berkelanjutan	00-Bukan prioritas bidang	Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi	106.721.660,00

			002-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	1250-Pendamping	01-Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	04-Pengentasan Kemiskinan	004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	07-Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial	00-Bukan prioritas bidang	Selatan, dan Provinsi Maluku	37.170.330,00
5417-Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat	01-Meningkatnya penanganan konflik tenurial bidang perhutanan sosial dan kemiskinan lingkungan	001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan									19.199.324,00
		002-Kasus konflik tenurial yang ditangani	40-Kasus	01-Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	04-Pengentasan Kemiskinan	004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	04-Penyajian prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan	00-Bukan prioritas bidang	Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku		3.900.000,00
			35-Kasus	01-Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	04-Pengentasan Kemiskinan	004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	04-Penyajian prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan	00-Bukan prioritas bidang	Pusat		4.200.000,00

5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01-Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal PHLHK	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1-Layanan				10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	26.012.000,00
		951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1-Layanan				10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi DKI Jakarta	2.250.000,00
		994-Layanan Perkantoran	1-Layanan				00-Bukan prioritas bidang	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	144.757.762,00
173.019.771,00									

5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan	01-Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman keamanan kawasan hutan di 34 Provinsi	001-Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	3000000-Hektar	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Penguatan Klembaragaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	00-Bukan prioritas bidang	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	67.465.000,00
		002-Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan illegal	110-Operasi					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	69.440.000,00
5429-Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	01-Meningkatnya efektifitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup									22.461.000,00

5430-Pemanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	01-Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketepatan terhadap Sanksi Administrasi	001-Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	46-Kasus	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	00-Bukan prioritas bidang	Provinsi DKI Jakarta	22.461.000,00
										62.830.000,00
		001-Ujsaha dan/atau kegiatan yang dilawasi keaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	1000-Perusahaan	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	00-Bukan prioritas bidang	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	52.830.000,00
		002-PPLH yang dilindungi kapasitasnya	200-Orang					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi DKI Jakarta	10.000.000,00

5431-Program Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01-Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang ditangani oleh PPNS LHK secara Profesional	001-Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	173-Kasus	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	00-Bukan prioritas bidang	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	56.986.250,00	73.575.000,00
029.11.13-Program Pengendalian Perubahan Iklim	01-Peningkatan efektivitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan 03-Penurunan luas area kebakaran hutan/lahan	002-PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	210-Orang					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	16.588.750,00	313.272.831,00

54-45-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	01-Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPI	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1-Layanan				10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	12.446.519,00	106.930.018,00
		951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1-Layanan				10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	3.020.000,00	
54-46-Adaptasi Perubahan Iklim	01-Meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim	994-Layanan Perkantoran	1-Layanan				07-Bidang hukum dan aparatur	Pusat, Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	91.463.499,00	
									3.200.000,00	

5449-Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim	01-Meningkatnya ketersediaan pendanaan dan kapasitas pengembangan sains perubahan iklim dan teknologi rendah karbon	001-Kapasitas Sains dan informasi teknologi rendah karbon yang ditingkatkan	300-Orang				10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	5.000.000,00
		006-Kebijakan sumberdaya pendanaan dan perundangan perubahan iklim	1-Dokumen				10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	3.000.000,00
5450-Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	01-Terjeminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian karhufia	004-Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	1200-Desa	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	182.892.813,00
							10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	150.502.813,00

029.12.14-Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	<p>01-Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang baik</p> <p>02-Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup dengan menurunkan resiko akibat paparan B3 dan limbah B3</p> <p>03-Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan nilai ekonomi pemanfaatan sampah dan limbah B3</p> <p>04-Efektifitas dukungan manajemen di lingkungan Diljen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3</p>	006-Penannggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	170-sorty	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	32.390.000,00
361.844.139,00										

5451-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	01-Terkelolanya kepekerjaannya yang baik melalui pelayanan internal di lingkungan Ditjen PSLB3	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1-Layanan																	50.516.130,00		
																					22.672.224,00	
																						36.843.915,00
5452-Pengelolaan B3	01-Terkelolanya jumlah dan jenis B3 yang beredar	994-Layanan Perkantoran	1-Layanan																		15.600.000,00	
																						1.900.000,00
																						850.000,00
																						850.000,00

02-Meningkatnya penggunaan teknologi pengolahan emas tanpa merkuri untuk kegiatan penambangan emas skala kecil	001-Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di daerah PESK	5-unit	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Pemangulaan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penghapusan dan Penggantian Merkuri di lokasi PESK	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara	12.000.000,00
5453-Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	01-Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkoleksi sebesar 374.680.305 ton dalam 5 tahun								9.100.000,00
	001-Layanan Perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	400-Industri					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	4.600.000,00
	002-Pengembangan Peraturan dan Penyelenggaraan Limbah B3 dan Limbah Non B3	3-Dokumen					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	4.500.000,00

5454-Pemilihan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	01-Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah medis secara terpadu minimal 1 unit di setiap Provinsi (32 Provinsi)	004-Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan sumber fasilitas pelayanan kesehatan	5-Unit	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua	76.140.000,00	102.540.000,00
	02-Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sebesar 374.688,305 ton dalam 5 tahun	002-Pembinaan pengelolaan limbah B3 untuk usaha/kegiatan	500-Ujaha kegiatan					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	8.350.000,00	
	03-Meningkatnya pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% (20.2 T)										

5455-Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3	01-Meningkatnya jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan non industri yang terpulihkan sebesar 100.000 ton dalam 5 tahun	001-Pembangunan Fasilitas Pemfaatan Limbah B3 dan Limbah Non B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi	2-Urit	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat	18.350.000,00
			10000-ton							30.850.000,00
	02-Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 374.686.305 ton dalam 5 tahun	003-Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Industri							Pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur	23.350.000,00
			250000-Ton							
	03-Meningkatnya penanganan kedaruratan limbah B3 sebesar 100% dalam 5 tahun	001-Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Industri							Pusat	3.950.000,00

5456-Pengelolaan Sampah	01-Meningkatnya jumlah pengurangan sampah sebesar 86.990.000 ton dalam 5 tahun (30% dari proyeksi timbulan sampah)	002-Pembangunan Sistem Penanganan Kedaruratan Limbah B3	1-sistem	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Peningkatan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	3.550.000,00
		001-Pengurangan Timbulan Sampah Nasional	126080-Ton					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat	143.938.000,00
	02-Meningkatnya jumlah penanganan sampah sebesar 262.420.000 ton dalam 5 tahun (70% dari proyeksi timbulan sampah)	002-Peningkatan Penanganan Sampah Nasional	41400-Ton					10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi	29.800.000,00

<p>028.13.15-Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p>	<p>01-Meningkatnya kualitas udara 02-Meningkatnya kualitas air 03-Meningkatnya kualitas tutupan lahan</p>	<p>04-Meningkatnya Kualitas Air Laut 06-Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH</p>				<p>Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Papua</p>	<p>670.467.758,00</p>
---	---	---	--	--	--	--	-----------------------

005-Data dan Informasi Kualitas Udara	510-Lokasi	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan	31.050.000,00
---------------------------------------	------------	---	--	--	---	---	---	---------------

5459-Pengendalian Pencemaran Air	01-Tersedianya ditta kualitas air							Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	158.530.000,00
----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	----------------

	010-Data dan Informasi Kualitas Air	631-716k	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan dan Pemantauan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan	96.439.210,00
--	-------------------------------------	----------	---	--	--	---	---	---	---------------

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	
	11-Terkendalinya Pencemaran Air di DAS Citarum

011-Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Air di DAS Citarum	1-DAS	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	06-Citarum Harum	02-Penanganan Limbah Cair dan Sanitasi - Kualitas Air: Klasifikasi Minimal Kelas IV	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Jawa Barat	12.000.790,00
12-Tersedianya Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air								

	012-Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air	49-Unit	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02- Penanggulan dan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat	50.000.000,00
--	---	---------	---	---	--	--	---	--	---------------

5460-Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	01-Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut							Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua	25.300.000,00
---	---	--	--	--	--	--	--	---	---------------

06-Tersedianya data dan informasi kualitas air laut	001-Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan fungsinya	4-Lokasi	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara	5.900.000,00
---	--	----------	---	--	---	--	---	--	--------------

006-Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya	34-Provinsi	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01- Pencegahan pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara	00-Bukan prioritas bidang	Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan	15.229.600,00
---	-------------	---	---	---	---	---------------------------	---	---------------

	007-Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	34-Provinsi	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penanganan Pencemaran di Pesisir dan Laut	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat	4.170.400,00
--	---	-------------	---	--	--	--	---	--	--------------

	Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua											01-Meningkatnya luasan lahan bekas pertambangan yang terpulihkan	5461 Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	57.138.675,00
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

	001-Luas lahan bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	77.5-Hektar	04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi	57.138.675,00
--	---	-------------	---	--	---	---	---	---	---------------

5462 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut	01-Pemulihan Ekosistem Gambut	Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua	319.550.000,00
---	-------------------------------	--	----------------

